



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG  
PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Pengisian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

*Handwritten signature*

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.



9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
19. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

## BAB II

### BESARAN BATAS JUMLAH PENGISIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG

#### Pasal 2

- (1) Besaran batas jumlah uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang didasarkan pada DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPAL, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya batas jumlah pengisian uang persediaan dan ganti uang ditetapkan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pengeluaran belanja masing-masing Perangkat Daerah di luar pengeluaran belanja yang bersifat langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengisian uang persediaan diajukan dengan SPM-UP.
- (3) Pengisian kembali uang persediaan dengan ganti uang diajukan dengan SPM-GU dirinci sampai dengan jenis belanja langsung dan dilampiri dengan jenis kegiatan sampai dengan rincian objek belanja yang telah membebani anggaran.

#### Pasal 4

Besaran batas jumlah pengisian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Besaran batas jumlah pengisian tambahan uang dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan Daerah dengan mempertimbangkan besarnya jumlah pengajuan tambahan uang, rincian kebutuhan dana, dan waktu penggunaan.
- (2) Batas jumlah pengisian tambahan uang diajukan dengan SPM-TU dirinci sampai dengan rincian objek belanja.

#### Pasal 6

Besaran batas jumlah pengajuan tambahan uang diberikan paling banyak sebesar pagu anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan belanja langsung.

### BAB III

#### PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG, DAN TAMBAH UANG

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan permintaan pembayaran berupa dokumen SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU dalam rangka pengisian uang, dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dengan menerbitkan SPM-UP, SPM-GU, dan SPM-TU.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-UP, SPM-GU, dan SPM-TU ke pada PPKD selaku BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU.

#### Pasal 8

- (1) SPM-UP sebagai uang muka kerja awal tidak dapat dilakukan untuk pembayaran langsung.



- (2) Pengisian kembali uang persediaan untuk tahap berikutnya diajukan melalui penerbitan SPM-GU setelah uang persediaan awal yang diterbitkan dengan SP2D-UP dipertanggungjawabkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 9

- (1) SPM-TU hanya dapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran secara langsung dan uang persediaan.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan SP2D, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 1

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	1	2	3	4	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) / PENGISIAN KEMBALI	KETERANGAN
						*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
46	- Kec. Magelang Utara	7,469,440,000	6,269,440,000			1,200,000,000	100,000,000	100,000,000	
47	- Kelurahan Wates	1,148,869,000	512,869,000			636,000,000	53,000,000	53,000,000	
48	- Kelurahan Kedungsari	1,276,351,000	556,351,000			720,000,000	60,000,000	60,000,000	
49	- Kelurahanh Potrobangsari	1,196,246,000	476,246,000			720,000,000	60,000,000	60,000,000	
50	- Kelurahan Kramat Selatan	1,332,615,000	552,615,000			780,000,000	65,000,000	65,000,000	
51	- Kelurahan Kramat Utara	961,290,000	277,290,000			684,000,000	57,000,000	57,000,000	
52	Inspektorat	14,556,171,000	13,164,171,000			1,392,000,000	116,000,000	116,000,000	
53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,514,565,000	8,217,669,000			2,296,896,000	191,408,000	191,408,000	
54	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51,723,482,000	43,811,702,000			7,911,780,000	659,315,000	659,315,000	
55	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21,782,876,000	17,855,000,000			3,927,876,000	327,323,000	327,323,000	
56	Badan Penelitian dan Pengembangan	4,745,187,000	3,545,187,000			1,200,000,000	100,000,000	100,000,000	
	J U M L A H	1,031,966,581,000	894,169,480,000			137,797,101,000	11,483,091,750	12,031,091,750	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYANINDITO

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) / PENGISIAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
46	~ Kec. Magelang Utara	7,469,440,000	6,269,440,000	1,200,000,000	100,000,000	100,000,000	
47	~ Kelurahan Wates	1,148,869,000	512,869,000	636,000,000	53,000,000	53,000,000	
48	~ Kelurahan Kedungsari	1,276,351,000	556,351,000	720,000,000	60,000,000	60,000,000	
49	~ Kelurahanh Poitrobangsari	1,196,246,000	476,246,000	720,000,000	60,000,000	60,000,000	
50	~ Kelurahan Kramat Selatan	1,332,615,000	552,615,000	780,000,000	65,000,000	65,000,000	
51	~ Kelurahan Kramat Utara	961,290,000	277,290,000	684,000,000	57,000,000	57,000,000	
52	Inspektorat	14,556,171,000	13,164,171,000	1,392,000,000	116,000,000	116,000,000	
53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,514,565,000	8,217,669,000	2,296,896,000	191,408,000	191,408,000	
54	Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah	51,723,482,000	43,811,702,000	7,911,780,000	659,315,000	659,315,000	
55	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21,782,876,000	17,855,000,000	3,927,876,000	327,323,000	327,323,000	
56	Badan Penelitian dan Pengembangan	4,745,187,000	3,545,187,000	1,200,000,000	100,000,000	100,000,000	
	J U M L A H	1,031,966,581,000	894,169,480,000	137,797,101,000	11,483,091,750	12,031,091,750	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, GANTI UANG PERSEDIaan DAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIaan TAHUN ANGGARAN 2019.

PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan,  
GANTI UANG PERSEDIaan DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIaan TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIaan UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIaan (UPI) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIaan (GU) / PENGISIAN KEMBALI	KETERANGAN
		3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169,284,703,000	153,684,703,000	15,600,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	
2	Dinas Kesehatan	71,867,512,000	66,203,512,000	5,664,000,000	472,000,000	472,000,000	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	250,968,507,000	250,968,507,000	-	-	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,626,394,000	77,626,394,000	-	-	548,000,000	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34,535,181,000	29,516,433,000	5,018,748,000	418,229,000	418,229,000	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12,298,080,000	9,238,080,000	3,060,000,000	255,000,000	255,000,000	
7	Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	5,426,558,000	3,254,558,000	2,172,000,000	181,000,000	181,000,000	
8	Dinas Sosial	6,138,297,000	2,274,297,000	3,864,000,000	322,000,000	322,000,000	
9	Dinas Tenaga Kerja	8,568,294,000	6,540,294,000	2,028,000,000	169,000,000	169,000,000	
10	Dinas Lingkungan Hidup	50,681,267,000	41,081,267,000	9,600,000,000	800,000,000	800,000,000	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,244,474,000	3,864,474,000	1,380,000,000	115,000,000	115,000,000	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,510,814,000	4,079,082,000	4,431,732,000	369,311,000	369,311,000	
13	Dinas Perhubungan	10,480,599,000	8,860,599,000	1,620,000,000	135,000,000	135,000,000	
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15,780,286,000	12,360,286,000	3,420,000,000	285,000,000	285,000,000	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	5,890,971,000	4,324,971,000	1,566,000,000	130,500,000	130,500,000	
16	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata	20,845,965,000	14,703,984,000	6,141,981,000	511,831,750	511,831,750	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,113,010,000	3,707,578,000	3,405,432,000	283,786,000	283,786,000	
18	Dinas Pertanian dan Pangan	12,777,877,000	9,417,877,000	3,360,000,000	280,000,000	280,000,000	
19	Dinas Perindustrian danPerdagangan	29,748,531,000	24,708,531,000	5,040,000,000	420,000,000	420,000,000	

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIaan UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIaan (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIaan (GU) / PENGISIAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11,093,973,000	11,093,973,000	-	-	-	-
21	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	783,082,000	783,082,000	-	-	-	-
22	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	2,560,681,000	1,576,681,000	984,000,000	82,000,000	82,000,000	
23	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	1,269,344,000	503,744,000	765,600,000	63,800,000	63,800,000	
24	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	1,964,434,000	1,382,434,000	582,000,000	48,500,000	48,500,000	
25	Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang	1,426,927,000	718,927,000	708,000,000	59,000,000	59,000,000	
26	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	2,198,724,000	1,202,724,000	996,000,000	83,000,000	83,000,000	
27	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	2,538,786,000	1,299,282,000	1,239,504,000	103,292,000	103,292,000	
28	Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Magelang	3,500,965,000	1,721,401,000	1,779,564,000	148,297,000	148,297,000	
29	Bagian Umum Setda Kota Magelang	7,573,509,000	2,773,509,000	4,800,000,000	400,000,000	400,000,000	
30	Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Magelang	18,410,636,000	16,490,636,000	1,920,000,000	160,000,000	160,000,000	
31	Sekretariat DPRD	29,091,863,000	12,891,863,000	16,200,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	
32	Kecamatan Magelang Selatan	8,540,100,000	7,490,100,000	1,050,000,000	87,500,000	87,500,000	
33	~ Kelurahan Tidar Selatan	940,438,000	400,438,000	540,000,000	45,000,000	45,000,000	
34	~ Kelurahan Tidar Utara	1,039,668,000	427,668,000	612,000,000	51,000,000	51,000,000	
35	~ Kelurahan Jurangombo Selatan	888,007,000	99,607,000	788,400,000	65,700,000	65,700,000	
36	~ Kelurahan Jurangombo Utara	752,591,000	212,591,000	540,000,000	45,000,000	45,000,000	
37	~ Kelurahan Rejowinangun Selatan	949,098,000	415,098,000	534,000,000	44,500,000	44,500,000	
38	~ Kelurahan Magersari	976,851,000	295,251,000	681,600,000	56,800,000	56,800,000	
39	~ Kec. Mgl. Tengah	8,933,729,000	7,816,889,000	1,116,840,000	93,070,000	93,070,000	
40	~ Kelurahan Magelang	864,318,000	447,078,000	417,240,000	34,770,000	34,770,000	
41	~ Kelurahan Gelangan	907,702,000	457,882,000	449,820,000	37,485,000	37,485,000	
42	~ Kelurahan Kemirejo	925,904,000	407,144,000	518,760,000	43,230,000	43,230,000	
43	~ Kelurahan panjang	733,958,000	319,634,000	414,324,000	34,527,000	34,527,000	
44	~ Kelurahan Rejowinangun Utara	1,394,973,000	632,205,000	762,768,000	63,564,000	63,564,000	
45	~ Kelurahan cacaban	1,211,908,000	655,672,000	556,236,000	46,353,000	46,353,000	